



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN EKONOMI SYARIAH TAHUN 2024

Eka Budiyantri
Analisis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perekonomian syariah terus tumbuh di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya peringkat Indonesia di tingkat global berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report, dari peringkat empat pada tahun 2023 menjadi peringkat tiga pada tahun 2024, dengan komponen terkuat pada makanan-minuman halal dan pariwisata ramah muslim (PRM). Dari sisi keuangan, peran perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi juga terus mengalami peningkatan. Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor riil mengalami pertumbuhan sebesar 15,8%, lebih tinggi dari pembiayaan sektor riil secara keseluruhan yang tumbuh 10,5%. Sektor makanan-minuman halal pada tahun 2023 tumbuh kuat mencapai 4,47% (yoy), walaupun tidak sebesar tahun 2022 yang tumbuh 4,90% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh permintaan masyarakat dan ekspor makanan dan minuman halal yang masih cukup kuat, didukung masih kuatnya permintaan masyarakat serta masih kuatnya ekspor makanan-minuman halal. Selain itu, kinerja makanan-minuman halal juga didukung oleh pencapaian sertifikasi halal yang semakin masif. Pada tahun 2023 tercatat 1.233.020 produk telah memiliki sertifikat halal. Pencapaian tersebut didorong oleh Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memudahkan Usaha Mikro Kecil (UMK) melakukan pendaftaran mandiri (*self declare*) hingga terbit sertifikat halal melalui aplikasi SiHalal.

Kinerja sektor PRM juga secara umum terus membaik seiring dengan adanya kebijakan pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI), pada tahun 2023 Indonesia bersama Malaysia menduduki peringkat pertama tujuan destinasi PRM global. Peringkat tersebut mendukung prospek sektor PRM ke depan yang diperkirakan masih akan positif seiring masih kuatnya konsumsi domestik serta mobilitas masyarakat secara nasional dan global.

Namun, di balik semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi syariah, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk menjadi pusat perekonomian syariah terbesar di dunia. *Pertama*, masih minimnya produksi, ketersediaan, dan kualitas bahan baku halal pada sektor industri syariah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri fesyen muslim (*modest fashion*) sebagai salah satu sektor utama penggerak industri halal, masih sangat bergantung pada impor bahan baku, yakni mencapai lebih dari USD5 miliar pada tahun 2022.

Kedua, masih rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat. Pada tahun 2023, Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan *tracking* survei nasional mengenai literasi ekonomi syariah. Survei tersebut menghasilkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia sebesar 28,01% atau meningkat 4,71% dibandingkan tahun 2022. Meski meningkat, nilai indeks yang mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terkait ekonomi syariah tersebut dinilai masih relatif rendah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan

porsi muslim sebesar 87% dari jumlah penduduk, sesungguhnya memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, gap antara tingkat pemahaman dan potensi ekonomi syariah tersebut perlu disikapi sebagai peluang untuk penguatan sinergi peningkatan literasi ekonomi syariah.

Atensi DPR

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia agar dalam pengembangan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menyediakan toko bahan baku halal yang *accessible and affordable*, meningkatkan infrastruktur pada proses sertifikasi halal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta meningkatkan literasi mengenai halal *lifestyle*. Selain itu, Komisi XI juga perlu mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan program maupun kebijakan yang dapat meningkatkan literasi keuangan syariah. Komisi XI juga perlu mengawasi setiap kebijakan atau program yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi syariah.

Sumber

antaranews.com, 26 Februari 2024;
bi.go.id, 24 Februari 2024;
bisnis.com, 26 Februari 2024;
cnbcindonesia.com, 26 Februari 2024;
kompas.com, 26 Februari 2024;
kompas.tv, 29 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024